



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

Dr. Masdiana, S.T.,M.T. | Gusman Arsyad, SST, M.Kes

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si | Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si

Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M | Tini Adiatma, S.Pd., M.Sc.

Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si. | Nurliyani, S.S.T.,M.Kes

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP | Dr.H.Miftahul Munir,SKM.,M.Kes.,DIE

Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si. | Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si

Dr. Cecep Ucu Rakhsman, S.Sos., M.M | Sri Mumpuni Yuniarsh., S.Kep., Ns., M. Kep



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

Dr. Masdiana, S.T.,M.T.
Gusman Arsyad, SST, M.Kes
Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si
Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M
Tini Adjatma, S.Pd., M.Sc.
Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.
Nurliyani, S.S.T.,M.Kes
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP
Dr.H.Miftahul Munir,SKM.,M.Kes.,DIE
Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si.
Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si
Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M
Sri Mumpuni Yuniarsih., S.Kep., Ns., M. Kep



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202372407, 27 Agustus 2023
Pencipta		
Nama	:	Dr. Masdiana, S.T.,M.T., Gusman Arsyad, SST, M.Kes dkk
Alamat	:	Jl. Cakalang No. 17 Kendari, Kendari Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93127
Kewarganegaraan		
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	Dr. Masdiana, S.T.,M.T., Gusman Arsyad, SST, M.Kes dkk
Alamat	:	Jl. Cakalang No. 17 Kendari, Kendari Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93127
Kewarganegaraan		
Jenis Ciptaan	:	Buku
Judul Ciptaan	:	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	27 Agustus 2023, di Surakarta (solo)
Jangka waktu perlindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan tetap berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000505360

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Masdiana, S.T.,M.T.	Jl. Cakalang No. 17 Kendari
2	Gusman Arsyad, SST, M.Kes	Perumahan Teluk Palu Permai Blok. H/16 Kel. Talise Palu
3	Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si	Jalan Martandu Lrg. Kharisma I RT 001/ RW 001 Kambu, Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara
4	Dr. Tuti Khairani Hanifah, S.Sos, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok I Nomor 3, Delima, Tampan Riau
5	Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M	Jl. Lokakarya, Perum Taman Indah Blok A4, Wongkadit Barat
6	Tini Adiatma, S.Pd., M.Sc.	Ledok, RT 17, RW 00, Sidorejo, Lendah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.	Kelurahan Pamona, RT/RW:11/004, Pamona, Poso, Sulawesi Tengah
8	Nurliyani, S.S.T.,M.Kes	Margodadi, Rt/Rw 009/003 Metro Selatan, Kota Metro, Lampung
9	Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP	Manggisan RT 003/ RW 009 Kartasura Sukoharjo
10	Dr.H.Miftahul Munir,SKM.,M.Kes.,DIE	Jl. Al Falah I / 80 RT 003 RW 001 Kelurahan Latsari, Tuban, Tuban, Jawa Timur
11	Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si.	Jl Merdeka Raya XVII/4, BTN Pepabri Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
12	Dr. Ir. Hj. Marhwati, M. Si	Jalan Andi Caco, Turnampua, Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan
13	Dr. Cecep Ucu Rakhaman, S.Sos., M.M	Jl. Pojok Utara II No.68 Rt.4 Rw.5 Kel. Setia manah Kec.Cimahi Tengah
14	Sri Mumpuni Yuniarisih,, S.Kep., Ns., M. Kep	Perum Graha Naya Permai 2 Blok C.5 Pekuncen Wirdesa Pekalongan

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Masdiana, S.T.,M.T.	Jl. Cakalang No. 17 Kendari
2	Gusman Arsyad, SST, M.Kes	Perumahan Teluk Palu Permai Blok. H/16 Kel. Talise Palu
3	Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si	Jalan Martandu Lrg. Kharisma I RT 001/ RW 001 Kambu, Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara
4	Dr. Tuti Khairani Hanifah, S.Sos, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok I Nomor 3, Delima, Tampan Riau
5	Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M	Jl. Lokakarya, Perum Taman Indah Blok A4, Wongkadit Barat
6	Tini Adiatma, S.Pd., M.Sc.	Ledok, RT 17, RW 00, Sidorejo, Lendah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.	Kelurahan Pamona, RT/RW:11/004, Pamona, Poso, Sulawesi Tengah
8	Nurliyani, S.S.T.,M.Kes	Margodadi, Rt/Rw 009/003 Metro Selatan, Kota Metro, Lampung

9	Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP	Manggisan RT 003/ RW 009 Kartasura Sukoharjo
10	Dr.H.Miftahul Munir,SKM.,M.Kes.,DIE	Jl. Al Falah I / 8D RT 003 RW 001 Kelurahan Lutsari, Tuban, Tuban, Jawa Timur
11	Ni Putu Ari Arynwati, SE., M.Si.	Jl Merdeka Raya XVII/4, BTN Pepabri Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
12	Dr. Ir. Hj. Marhwati, M. Si	Jalan Andi Caco, Tumampua, Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan
13	Dr. Cecep Ucu Rakman, S.Sos., M.M	Jl. Pojok Utara II No.68 Rt.4 Rw.5 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah
14	Sri Mumpuni Yuniarshih., S.Kep., Ns., M. Kep	Perum Graha Naya Permata 2 Blok C.5 Pekuncen Wiradesa Pekalongan



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

Penulis:

Dr. Masdiana, S.T.,M.T. | Gusman Arsyad, SST, M.Kes
Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si | Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M | Tini Adiatma, S.Pd., M.Sc.
Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si. | Nurliyani, S.S.T.,M.Kes
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP | Dr.H.Miftahul Munir,SKM.,M.Kes.,DIE
Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si. | Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si
Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M | Sri Mumpuni Yuniarsih., S.Kep., Ns., M. Kep

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
xii, 220, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-133-8

Cetakan Pertama:
Agustus 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IAKPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku kolaborasi ini dapat dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan pembaca. Buku ini ditulis oleh sejumlah Dosen dan Praktisi dari berbagai Institusi sesuai dengan kepakarannya serta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam ilmu pengetahuan dan tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu dari segi konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika buku yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Berbagai Aspek” terdiri dari 14 Bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- Bab 1 Kondisi Masyarakat Indonesia
- Bab 2 Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat
- Bab 3 Fungsi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- Bab 4 Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- Bab 5 Masyarakat Mandiri
- Bab 6 Metode Dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat
- Bab 7 Potensi Daerah Ditinjau Dari Kondisi Demografis
- Bab 8 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas
- Bab 9 Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pendidikan
- Bab 10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan
- Bab 11 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi
- Bab 12 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian
- Bab 13 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pariwisata
- Bab 14 Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Direktur Tahta Media
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 Kondisi Masyarakat Indonesia	
Dr. Masdiana, S.T.,M.T.	
Universitas Halu Oleo	
A. Pendahuluan.....	2
B. Kondisi Masyarakat Indonesia.....	3
C. Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan.....	8
D. Kesimpulan	11
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	13
Bab 2 Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat	
Gusman Arsyad, SST, M.Kes	
POLTEKKES KEMENKES Palu	
A. Pendahuluan.....	15
B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	19
C. Prinsip	19
D. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.....	23
E. Tahapan.....	25
Daftar Pustaka	28
Profil Penulis	30
Bab 3 Fungsi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat	
Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si	
Universitas Lakidende	
A. Pendahuluan.....	32
B. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	33
C. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	36
D. Fungsi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	42
E. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.....	46
F. Penutup	49
Daftar Pustaka	51
Profil Penulis	53

Bab 4 Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si

Universitas Riau

A. Pengantar.....	56
B. Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	60
Daftar Pustaka	66
Profil Penulis	68

Bab 5 Masyarakat Mandiri

Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M

Universitas Negeri Gorontalo

A. Pendahuluan.....	70
B. Pengertian Masyarakat Mandiri	71
C. Karakteristik Masyarakat Mandiri	73
D. Tingkatan Masyarakat Mandiri.....	75
E. Membentuk Masyarakat Mandiri.....	76
F. Tantangan dan Hambatan Masyarakat Mandiri	81
G. Peran Masyarakat Mandiri Dalam Pembangunan.....	82
Daftar Pustaka	88
Profil Penulis	89

Bab 6 Metode Dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat

Tini Adiatma, M.Sc.

Universitas Musamus

A. Asset – Based Community Development	91
B. Environmental Scanning (ES).....	92
C. Participatory Rural Appraisal (PRA)	93
D. Ziel Orientierte Project Planning (ZOPP)	94
E. Logical Framework Approach (LFA)	96
F. Participatory Impact Monitoring (PIM)	96
G. Participatory Action Research (PAR)	97
H. Participatory Learning And Action (PLA).....	98
I. Focus Group Discusion (FGD)	100
Daftar Pustaka	101
Profil Penulis	107

Bab 7 Potensi Daerah Ditinjau Dari Kondisi Demografis

Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.

Universitas Kristen Tentena

A. Pendahuluan	109
B. Jumlah Penduduk Indonesia.....	110
C. Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia	110
D. Persentase Jumlah dan Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2020 – 2022.....	112
E. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	114
F. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 – 24 Tahun.....	116
G. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Tempat Tinggal	119
Daftar Pustaka	121
Profil Penulis	122

Bab 8 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas

Nurliyani, S.S.T.,M.Kes

Univeristas Malahayati

A. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas	124
Daftar Pustaka	132
Profil Penulis	133

Bab 9 Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pendidikan

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

A. Pendahuluan	135
B. Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pendidikan.....	137
Daftar Pustaka	141
Profil Penulis	142

Bab 10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

Dr. H. Miftahul Munir, SKM.,M.Kes.,DIE

Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban

A. Definisi Kesehatan Masyarakat	144
B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	146
C. Partnership / Kemitraan	147
D. Langkah – Langkah Kemitraan.....	152
E. Model dan Jenis Kemitraan.....	154
F. Indikator Hasil Pemberdayaan Masyarakat	155

Daftar Pustaka	157
Profil Penulis	158
Bab 11 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi	
Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si.	
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram	
A. Pendahuluan.....	160
B. Analisis Isu.....	161
C. Pelaksanaan.....	163
Daftar Pustaka	167
Profil penulis	168
Bab 12 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian	
Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	170
B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	172
C. Dasar Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian.....	176
D. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat	180
E. Upaya Pokok dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian	181
F. Contoh – Contoh Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian ...	184
Daftar Pustaka	187
Profil Penulis	189
Bab 13 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pariwisata	
Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M	
Politeknik Pariwisata NHI Bandung	
A. Pendahuluan.....	191
B. Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	192
C. Pemberdayaan Masyarakat Lokal	195
D. <i>Best Practice</i> Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pariwisata	197
E. Pemberdayaan Melalui Praktik Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pariwisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat	198
Daftar Pustaka	207
Profil Penulis	208

Bab 14 Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat

Sri Mumpuni Yuniarsih., S.Kep., Ns., M. Kep

Universitas Pekalongan

A. Pendahuluan	210
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat	211
C. Scaling Up Program	215
D. Program Pemberdayaan Masyarakat Sawit Kabupaten Boyolali Dalam Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur	216
Daftar Pustaka	218
Profil Penulis	220

BAB 1

KONDISI MASYARAKAT INDONESIA

Dr. Masdiana, S.T.,M.T.
Universitas Halu Oleo

A. PENDAHULUAN



Gambar 1.1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia
(sumber:(menpan.go.id,2023)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan -2,71% di tahun 2020 sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini disebabkan seluruh dunia mengalami kondisi pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Strategi Pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah daerah memulihkan kondisi ekonomi di tahun 2020 yaitu secara konsisten membangun kerja sama dengan komponen bangsa. Pemerintah Daerah memiliki peran sangat penting pada pemulihan ekonomi Indonesia terutama setelah Pandemi Covid-19, mendorong percepatan perbaikan ekonomi dan efektivitas pemulihan. Pemerintah daerah harus mengetahui kondisi ekonomi, kondisi demografi dan kondisi sosial masyarakatnya saat Pandemi Covid 19 serta menetapkan suatu tolak ukur dalam kegiatan pemulihan perekonomian melalui perencanaan APBD.

Alokasi dana APBN bertujuan untuk menggerakkan ekonomi di daerah agar kesejahteraan masyarakat segera tercapai. Pemerintah menetapkan kebijakan APBN agar terjadi peningkatan konsumsi dalam negeri, aktivitas dunia usaha, dan ekspansi moneter. Ada 3 (tiga) berperan dalam menentukan

kebijakan antar pemegang kebijakan fiskal, kebijakan moneter serta institusi terkait.

B. KONDISI MASYARAKAT INDONESIA



Gambar 1.2 Pemeriksaan Rapid test
(Sumber: (kompas.com, 2022)

Peran penting dalam pemulihan ekonomi suatu negara adalah masyarakat dan pelaku usaha. Kewajiban pemerintah adalah memberi kemudahan menjalankan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Jika kedua kebijakan dijalankan secara baik oleh masyarakat dan pelaku usaha maka perekonomian dapat bergerak sesuai rancangan. Kondisi masyarakat Indonesia terbagi atas 3(tiga) bagian, antara lain:

1. Sebelum Covid 19

Nilai tingkat perekonomian negara dengan mengukur pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mengalami kenaikan sebesar 5,02% di tahun 2019. Nilai ini lebih rendah dari target pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perang dagang antara 2(dua) negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah ini terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan terutama pada penyediaan lapangan kerja bidang jasa mencapai 10,55%,

DAFTAR PUSTAKA

- Yohanes advent (2022) Indeks Kenormalan Ukuran Perbedaan Cara Hidup Sebelum dan Ketika Pandemi
<https://www.kompas.id/baca/linimasa/2022/02/20/indeks-kenormalan-ukuran-perbedaan-cara-hidup-sebelum-dan-ketika-pandemi>
- Sitti Kholifah (2022) Sistem Ekonomi Kerakyatan Pengertian Ciri Contohnya
<https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Sistem-Ekonomi-Kerakyatan-Pengertian-Ciri-Contohnya/c00abc02cd9038d1a693dc75a3ecdad944aed759>
- Anonym 2020 Mengenal Sistem Ekonomi Mengenal Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia
<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php?id=artikel/311-mengenal-sistem-ekonomi-kerakyatan-di-indonesia>
- Anonym (2023) Teori Pertumbuhan Ekonomi
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/08/teori-pertumbuhan-ekonomi>
- Anonym (2022) Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31Persen
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen>

PROFIL PENULIS



Dr. Masdiana, ST.,MT

Penulis merupakan Dosen Program Studi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo sejak tahun 2008. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan tenaga inti di perusahaan PT.Dian Teknik Utama Kendari sejak tahun 1995. Penulis telah menyelesaikan buku sebanyak 25 buku di antaranya Geometri Jalan, Teknologi Beton, Aljabar Linear. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Email: masdiana.unhalu@gmail.com

BAB 2

KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gusman Arsyad, SST, M.Kes
POLTEKKES KEMENKES Palu

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan (empowerment) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan Upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain.

Konsep empowerment yang berasal dari Eropa mulai nampak pada dekade 70-an dan berkembang sepanjang tahun 80-an sampai 90-an. Konsep ini dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran-aliran paruh kedua abad 20 yang banyak dikenal sebagai aliran Posmodernisme dengan titik berat sikap dan orientasinya adalah anti sistem, anti struktur dan selanjutnya melahirkan konsep civil society atau masyarakat sipil

Keterlibatan partisipasi masyarakat ini sebagai paradigma baru dalam pembangunan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan menjaga dan melestarikan sumber daya air beserta infrastrukturnya.

Istilah pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan derajat otonomi dan penentuan nasib sendiri seseorang untuk memungkinkan mereka mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak sesuai dengan otoritas mereka.

Di sisi lain, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris empowerment, berasal dari kata “daya” dengan awalan ber menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kekuatan. Daya berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti memiliki kekuatan. Dengan demikian, pemberdayaan ini dapat dipahami sebagai memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya atau kekuatan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas , kompetensi,dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat

mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang menunjang kemandirian masyarakat tersebut.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak imbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksloitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terduduk dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mampu meraih kesempatan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan. Intervensi Komunita. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Aziz Muslim, (2012), Dasar- dasar Pengembangan Masyarakat, Samudera Baru, Yogyakarta
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E.Nainggolan (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish Yogyakarta.
- Hetifah Sj. Sumarto, (2004). Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka CIDESINDO. Jakarta.
- Lifa Indri Astuti, dkk, Jurnal “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, (2005) Dakwah Pemberdayaan. Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta: PT. Pelangi Aksara.
- Najiyati, Sri. Dkk, (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.
- Ndraha, Taliziduhu, (2003). Kronologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Direksi Cipta, Jakarta.
- Suharto, Edi, (2010), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama. Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan (1999) Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Bina Rena Pawira,
- Suryana, Sawa. 2010. Pemberdayaan Masyarakat, Bumi Aksara, Jakarta

Wijaya. (2003). Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi. P2ELIPI. : Jakarta.

PROFIL PENULIS



Gusman Arsyad, SST, M.Kes, Lahir di desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah pada 06 Agustus 1961, Pendidikan tinggi dimulai dari Diploma III Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS) Surabaya lulus tahun 1989, Diploma IV Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya lulus tahun 2001 dan Pasca Sarjana Prodi Kesehatan Kerja Minat Kesehatan Lingkungan pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2007. Pengalaman mengajar dimulai pada SPPH Depkes Palu tahun 1991 – 2004. AKL Depkes Palu 1999 – 2003, STIK-IJ Palu tahun 2002 – 2017, pernah pula mengajar beberapa tahun di FKM Unismuh Palu dan Akademi Kebidanan Palu Yayasan Pendidikan Cendrawasih. Sejak tahun 2003 hingga sekarang merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palu. Karya ilmiah yang dihasilkan beberapa artikel ilmiah nasional dan internasional serta Buku referensi diantaranya, seri kesehatan Lingkungan “Penyehatan Pemukian” bersama beberapa kawan dan diterbitkan oleh Gosyen Publishing Yogyakarta, Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Penerbit Adab Indramayu Jabar, Dasar Kesehatan Lingkungan Penerbit Pradina Purstaka, Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan, Penerbit Tahta Media Group., Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan, Tahta Media Group. Model Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (*Midwifery Continuity of Care*) bagi Bidan dan Perawat, Penerbit Andi Yogyakarta. Motto penulis “*Karyamu akan Menempati bagian Tersendiri dalam Hidupmu*”

BAB 3

FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si
Universitas Lakidende

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan bagian konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan *people centered, participatory, empowering, and sustainable* (Chambers (1995 dalam Musa, 2017). Pemberdayaan yakni upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi diri yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya ke arah yang positif. Dalam terminologi pembangunan, secara praktis diartikan sebagai upaya untuk melibatkan, dan memberikan tanggungjawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan kesejahteraan (Musa, 2017).

Pada hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia, sedangkan faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepas dari diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, sebagai upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Musa (2017)

Mufidah, & Septiani (2020) Upaya pemberdayaan masyarakat ini melibatkan segenap komponen masyarakat sendiri, selain itu pimpinan yang mampu menjadi leadear juga penting. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting karena masyarakat sebagai pelaku utama harus mengerti akan potensinya dan perlu inovasi untuk menjalankan kegiatan sesuai potensi. Inovasi ini akan menjadi pendorong dalam kegiatan serta solusi pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan adalah: (1) peningkatan penerimaan masyarakat dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menurun; (2) peningkatan kegiatan sosial ekonomi di pedesaan; (3) peningkatan kemampuan masyarakat dalam kelembagaan. Effendi & Sugandini (2013: 67) bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar

itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Pada dasarnya pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan daya atau kompetensi masyarakat agar dapat mandiri dalam menghadapi dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Namun hal ini dapat terwujud jika pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah sebagai pelayanan, pengatur, pembimbing, pembina bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.

B. DEFINISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Yunus et al (2017: 1) menyatakan bahwa pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “*Power*”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah.

Menurut Therisia et. al (2014: 93) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dengan kata lain membersayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Chambers (1995) dalam Soleh (2014: 133) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial sekaligus. Konsep ini mencerminkan adanya paradigma baru dari pembangunan yang bersifat ” *people-centered, participatory, empowering and sustainable* ”. Cakupan konsep ini jauh lebih luas dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) atau sekedar sebagai mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lanjut (*savety-net*) atau sekedar sebagai mekanisme untuk mencegah tetapi dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Gunawan Sumodiningrat, dalam Musa (2017) bahwa arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu : Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R.. (2001). Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: F –UI.
- Effendi, M. I. & Sugandini, D.(2013), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Keefektivian Program PNPM-MD: Kajian Teori dan Empiris*, Yogyakarta: Penerbit: Badan Usaha UPN Veteran.
- Kusumawardani, E.; Sujarwo, Prasetyo, I., (2023) Penguatan Kapasitas Inovasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata Berkelanjutan, *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18(1), 12–23, DOI: 10.17977/um041vxxixx2023p12-23.
- Laksono, B. A. & Rohmah, N., (2019) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Dan Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Nonformal* Volume 14, No. 1, 1-11
- Mufidah, Y. I. & Septiani, Y. (2020) Pemerintah Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM*, 1 (2), 160-168.
- Musa (2017) Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8 (1), 107-125
- Mustangin, Kusniawati, D.; Islami, N. P.; Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E., (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2(1):59-72.
- Nurdin, M.; Nurmaeta, S. & Tahir, M., (2014) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, *Jurnal Otoritas* 4 (1), 66-78.
- Purbantara, A. & Mujianto, (2019) *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta: Diterbitkan pertama kali oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Soleh, C. (2014) *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, Bandung: Fokusmedia

Supriatna, T. (2000), *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta

Theresia, A. et. al. (2014), *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Yunus, S.,; Suadi & Fadli, (2017) *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Cetakan Pertama, Banda Aceh: Penerbit dan Percetakan Bandar Publishing

Zulkarnain (2018) Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 11, Nomor 2, Juli 2018 (103-110)* 103-110

PROFIL PENULIS



Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si., Lahir, 14 Juni 1970, di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara, anak ke-5 dari 8 bersaudara dari Pasangan Suami Istri Kasman D. dan Nahe. Agama Islam, Menikah dengan Sartin, S.I.K., Telah dikaruniai dua orang Putra-Putri masing-masing Nur Rachmatiya Rosa Zahra, S.S. dan Ari Nurfauzan Mubarak. Menamatkan Pendidikan SD Negeri Pamandati (1983), SMP Negeri Pamandati (1986), SPG Negeri Kendari (1989). Mengikuti Pendidikan pada Program Studi S1 PMP dan KN, FKIP Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari tamat (1996) sebagai lulusan terbaik satu. Tahun 2010 melanjutkan pendidikan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana UHO Tamat Maret (2012) sebagai wisudawan terbaik (*cum laude*). Tahun 2013 mengikuti Program Doktor Ilmu Manajemen (konsentrasi Administrasi Publik) pada Universitas Halu Oleo Tamat Desember (2016) sebagai wisudawan terbaik (*cum laude*).

Karir penulis sebagai Dosen Tetap Yayasan Lakidende Razak Porosi sejak tahun 2009 dan aktif mengajar pada Universitas Lakidende (UNILAKI) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis pernah menjadi Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNILAKI (2018-2020) dan Dekan FIA UNILAKI (2022-sekarang), Anggota Senat UNILAKI Tahun 2018-2020 dan tahun 2022-sekarang, Tim Kerja LPM UNILAKI Unit FIA UNILAKI tahun 2018. Wakil Ketua II (2019-2022) pada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia (*Indonesian Association for Public Administration*) Wilayah Sulawesi Tenggara.

Penulis mengampu Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sistem Informasi Manajemen, Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Administrasi Perpajakan, Administrasi Lingkungan, Pendidikan Pancasila, Etika Administrasi Negara, Asas-Asas Manajemen, Pelayanan Publik, Dasar-Dasar Logika, Asas-Asas Manajemen, Manajemen Pelayanan Publik, Manajemen Publik, Pelayanan Publik, MSDM,

Kepemimpinan, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, Metode Penelitian Administrasi Kualitatif dan Kuantitatif, Governansi Digital, Kewirausahaan, Administrasi Agroindustri Perdesaan, Administrasi dan Kebijakan Agroindustri Administrasi Kewirausahaan, Administrasi Pemerintahan Desa, Desentralisasi dan Otoda dsb. Penulis aktif membimbing dan menguji proposal penelitian, hasil penelitian dan skripsi. Selain itu, penulis juga menjadi Reviewer pada Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik (Publica) Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Sejak tahun 2017-2023, Penulis sering menjadi Narasumber dalam kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan dan UMKM yang merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Narasumber pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan pada Pelaku UMKM di Kabupaten Konawe Selatan (2020-2023). Menjadi narasumber dalam Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal IKA, dan NKRI) yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penulis sering menulis opini pada koran Kendari Pos, Aktif menulis jurnal nasional dan jurnal internasional. Penulis aktif dalam kegiatan webinar/seminar nasional dan internasional. Aktif menulis *Book Chapter*: Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (2022), Ilmu Administrasi Bisnis (2023), Kepemimpinan Di Sekolah (2023), Manajemen Pelayanan Publik: Teori dan Konsep (2023), Transformasi Pendidikan Abad ke-21 (2023), Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Berbagai Aspek (2023).

BAB 4

PERAN LSM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Universitas Riau

A. PENGANTAR

Dimensi utama adminstrasi publik yang demokratis dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan administrasi publik yang melibatkan partisipasi publik sehingga terdapat aktifitas administrasi publik yang mengacu pada adanya keterlibatan publik seperti aktifitas pelaksanaan program pembangunan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat. Pemerintah seringkali mengarahkan bahwa program pembangunan yang dilakukan sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Namun saat ini makna partisipasi banyak diartikan dengan swadaya masyarakat yang diberikan dalam kegiatan pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dengan mudah dengan pendekatan kepentingan masyarakat terhadap suatu program pembangunan. Semakin besar kepentingan masyarakat terhadap suatu program pembangunan maka secara otomatis pula meningkatkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan tinggi pada program pembangunan yang dilaksanakan. Pelaksanaan program pembangunan akan mengalami hambatan jika partisipasi masyarakat tidak ada. Salah satu upaya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yaitu dengan memberikan ruang bagi organisasi masyarakat (Ormas) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan sarana yang digunakan untuk melihat potensi di dalam masyarakat. Pemberdayaan dilakukan oleh sekelompok orang dengan motif yang berbeda. Dalam proses pemberdayaan yang sering menjadi objek pemberdayaan adalah masyarakat pedesaan. Pasalnya masyarakat desa cenderung dianggap sekelompok orang yang masih tradisional, primitif, pendidikan rendah, dan minim kesejahteraan. Kemudian masyarakat desa masih mengandalkan alam untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Pemberdayaan di tingkat desa merupakan proses dan aktifitas menuju sebuah kemandirian masyarakat desa, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur, atau komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan yang

menghasilkan swakarsa, swakarya, dan swadaya masyarakat desa. (Taufik Nurohman, (2018 : 82)

Salah satu organisasi yang menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pertama kalinya dikenal melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemudian dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada persoalan lingkungan hidup saja tentunya.

Negara Indonesia saat ini memiliki LSM yang banyak sekali. LSM tersebut terdiri dari beberapa organisasi yaitu organisasi dari masyarakat (Ormas), oleh masyarakat dan untuk masyarakat. LSM populer pada tahun 1970 ketika sedang terjadi krisis di Indonesia, konflik politik, pelarian politik, kekerasan oleh negara, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Dasar berdirinya LSM di Indonesia yaitu membentuk suatu organisasi, perkumpulan atau apapun namanya merupakan suatu perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan : “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi non pemerintah ini bercirikan organisasi bukan bagian dari pemerintah. (Gossary HAM dalam Whidia Arum Wibawana, 2023).

Setiap tahunnya yaitu tanggal 27 Februari adalah peringatan Hari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sedunia yang didedikasikan untuk menunjukkan adanya suatu sikap terhadap LSM mengakui, merayakan, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. (1995). Poverty and Livelihoods : Whose Reality Count? Uner Kirdar and Leonard Silk (eds), People : From Improverishment to Empowerment, New York : New York University Press.
- Denhardt, Janet V and Robert B. Denhardt, (2003), The New Public Service, Armonk : M.E. Sharpe.
- Ginandjar Kartasasmita, (1997), Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Makalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 14 Maret 1997 halaman : 11-12, diakses tahun 2023 dari : http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/09PemberdayaanMasyarakat.pdf
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2007) , Balai Pustaka, Jakarta
- Nurohman, Taufik, (2018), Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Peran LSM Kompleet Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Melung Kabupaten Banyumas) diakses tahun 2023 dari : <https://fisip.unsil.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Peran-LSM-dalam-Pemberdayaan-Masyarakat.pdf>.
- Perpustakaan Universitas Brawijaya, Hari LSM Sedunia, diakses tahun 2023 dari: <https://lib.ub.ac.id/news/hari-lsm-sedunia/>
- Robert, Nancy C.ed, (2008), The Age of Direct Citizen Partisipation, M.E. Share. Inc. New York.
- The New Oxford Illustrated Dictionary, (1982), (Oxford University Press).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), diakses tahun 2023 dari: https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_17_Tahun_2013

Wibawana, Whidia Arum (2023), Apa itu LSM, dan Apa Tugasnya?, Simak Penjelasannya disini, diakses tahun 2023 dari:<https://news.detik.com/berita/d-6525953/apa-itu-lsm-dan-apa-tugasnya-simak-penjelasannya-di-sini>.

PROFIL PENULIS



Dr.Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si. lahir di Medan, 12 Agustus 1973 dari pasangan Ayahnya yang bernama H. Djunusin Harahap, BA dan Ibunya yang bernama Hj. Nurmiah Siregar. Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap di Universitas Riau pada program studi Administrasi Publik. Gelar S.Sos. diperoleh dari Universitas Riau (1997), gelar M.Si. diperoleh dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau (2004), dan gelar Dr. diperoleh dari Program Doktor Ilmu Administasi Universitas Brawijaya (2011). Pernah menempuh Sandwich Like Program di La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (2009). Penulis beberapa buku serta penulis diberbagai media nasional. Pemakalah dalam Seminar Nasional dan Seminar Internasional. Pengurus Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia, Pengurus DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Sekretaris Tim Penyusun Proposal Komite Pemrakarsa Pembentukan LAMSPAK (Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi), Ketua Dewan Pertimbangan pada Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Ketua DPW Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia (AKAPI) Propinsi Riau serta organisasi lainnya. Email : lenka.malika2012@gmail.com

BAB 5

MASYARAKAT MANDIRI

Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M
Universitas Negeri Gorontalo

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Mandiri adalah konsep yang mendasari perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Konsep ini menekankan pada kemandirian individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan, mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pada dasarnya, Masyarakat Mandiri berangkat dari prinsip bahwa individu memiliki potensi dan kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri secara mandiri. Ini melibatkan penguatan individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan, mengambil inisiatif, dan mencapai kesejahteraan pribadi. Dalam konteks Masyarakat Mandiri, individu didorong untuk mengembangkan keterampilan kehidupan sehari-hari seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Masyarakat Mandiri juga mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Penting untuk mencatat bahwa Masyarakat Mandiri bukan berarti setiap individu harus bertindak secara terpisah atau individualistik. Sebaliknya, konsep ini menghargai pentingnya kerjasama, solidaritas, dan saling ketergantungan dalam mencapai kemandirian dan kemajuan bersama.

Masyarakat Mandiri memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dan pemberdayaan sosial. Ketika individu dan kelompok masyarakat menjadi lebih mandiri, mereka dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial, membangun usaha dan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Mandiri, pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong kemandirian. Ini termasuk memberikan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya dan layanan, serta menciptakan kebijakan yang memfasilitasi partisipasi dan kemandirian masyarakat. Dalam kesimpulannya, Masyarakat Mandiri merupakan konsep yang menggambarkan upaya untuk mendorong kemandirian individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan, mengambil tanggung jawab, dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial

dan ekonomi. Dengan masyarakat yang lebih mandiri, kita dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan individu dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan.

B. PENGERTIAN MASYARAKAT MANDIRI

Berikut adalah beberapa definisi atau pemahaman tentang konsep Masyarakat Mandiri menurut beberapa ahli:

1. S.N. Eisenstadt (1996): Menurut Eisenstadt, Masyarakat Mandiri merujuk pada kemampuan dan kapasitas suatu masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri, mengelola sumber daya, dan mengembangkan institusi sosial dan politik yang memungkinkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Paul Collier dan Anthony J. Venables (2010): Masyarakat Mandiri adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara efektif, mengembangkan usaha dan industri lokal, serta membangun ekonomi yang berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan atau sumber daya luar.
3. Robert Chambers (1997): Chambers mendefinisikan Masyarakat Mandiri sebagai masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri, mempengaruhi perkembangan mereka, dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Masyarakat Mandiri juga berarti memiliki akses terhadap informasi, pengetahuan, dan sumber daya yang mereka perlukan untuk mengelola kehidupan mereka dengan baik.
4. Gerald Midgley (2000): Menurut Midgley, Masyarakat Mandiri melibatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi, beradaptasi dengan perubahan, dan mempengaruhi proses pembangunan melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
5. World Bank (2005): World Bank mendefinisikan Masyarakat Mandiri sebagai masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, layanan dasar, kesempatan ekonomi, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last.* Intermediate Technology Publications.
- Collier, Paul, & Venables, Anthony J. (2010). *Natural Resources and Economic Development.* Princeton University Press.
- Eisenstadt, S.N. (1996). *The Republic in Theory and Practice: Perspectives on Politically Autonomous Communities.* Ashgate.
- Emy Susanti dan Arief Rachman, 2018. *Masyarakat Mandiri: Kajian Teoritik dan Empiris di Indonesia.* Penerbit: PT RajaGrafindo Persada
- Gino Fernandez, 2013. *Masyarakat Mandiri: Filsafat dan Penerapannya di Indonesia.* Penerbit Gajah Mada University Press.
- Ichsan Malik, 2008. *Masyarakat Mandiri: Teori, Konsep, dan Realitas di Indonesia.* Penerbit : LP3ES
- I. G. N. Anom Gede Arya Wiwaha, 2015. *Masyarakat Mandiri: Perspektif dan Praktik.* Penerbit : Pustaka Jaya
- Masduki Baidlowi, 2002. *Masyarakat Mandiri dalam Perubahan: Kumpulan Karya.* Penerbit : Humaniora Utama Press.
- Midgley, Gerald. (2000). *Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice.* Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Titik Anas, 2009. *Masyarakat Mandiri dari Pinggiran: Kajian Terhadap Kesejahteraan Sosial.* Penerbit : Pustaka Pelajar
- World Bank. (2005). *World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone.* World Bank Publications.

PROFIL PENULIS



Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M

Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2009. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Nilai Perusahaan, Aset dan Liabilitas, Pengantar Pasar Modal, Literasi Keuangan, dan lainnya. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Google scholar ID: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=FcOgS0AAAAJ
Email: lina_rasjid@ung.ac.id

BAB 6

METODE DAN TEKNIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tini Adiatma, M.Sc.
Universitas Musamus

A. ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)

Asset-Based Community Development (ABCD) adalah pendekatan dalam pengembangan masyarakat(Efendi et al., 2021). Konsep pemberdayaan masyarakat ini, dilakukan berdasarkan asset yang dimiliki oleh masyarakat. Aset yang dimaksud adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat ini dapat digunakan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan program pemberdayaan. Potensi yang digunakan berupa potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di lingkungan dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan. Potensi yang dimiliki merupakan kekuatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada kapasitas, intervensi dan penyertaan pendekatan lain selain metode tradisional dalam identifikasi sehingga lebih inovatif dan lebih efisien untuk masyarakat. Potensi yang dimiliki suatu wilayah bukan berarti selalu bersifat signifikan namun bukan berarti tidak dapat dioptimalkan.

Pendekatan ini mengajarkan pada masyarakat bahwa kesejahteraan suatu daerah bukan bergantung pada pihak luar namun dikembangkan dari potensi yang dimiliki dan dikembangkan oleh anggota masyarakat itu sendiri(Al-Kautsari, 2019). Tahapan yang dilakukan dalam implementasi ABCD terdapat lima langkah yaitu *discovery*, *dream*, *design*, *define*, dan *destiny*(Al-Kautsari, 2019; Kamelia & Pawhestri, 2021; Maulana, 2019).

1. Discovery (menemukan) : menemukan potensi yang terdapat di wilayah sasaran pemberdayaan masyarakat
2. Dream (impian): mengetahui harapan dan Impian yang diinginkan oleh setiap individu atau masyarakat yang akan didampingi.
3. Design (merancang) : merancang kegiatan untuk mewujudkan mimpi tersebut.
4. Define (menentukan) : memetakan aset individu
5. Destiny (melakukan) : memanfaatkan aset yang dimiliki oleh masyarakat

Contoh pemberdayaan masyarakat yang menggunakan metode ABCD diantaranya adalah kegiatan yang dilakukan di desa Ledok Sambi, Kaliurang(Maulana, 2019). Pengembangan desa wisata ini meliputi beberapa asset diantaranya adalah aset manusia, aset alam, aset spiritual, aset sosial, aset fisik, aset tradisi-budaya dan aset ekonomi. Contoh lain adalah pemberdayaan petani karet yang dilakukan di Desa Adi Mulyo, Kabupaten Mesuji (Kamelia & Pawhestri, 2021). Aset yang dimiliki desa ini adalah aset

masyarakat, aset fisik dan aset sosial. (Yuwana, 2022) juga menggunakan pendekatan ABCD untuk meningkatkan kualitas SDM di Desa Pecalongan Sukosari, Bondowoso. Di desa ini terdapat lima aset, dan perlu melakukan pendampingan untuk pengelolaan aset yang dimiliki sebagai upaya peningkatan aset individu dan kelembagaan untuk menjadi tambahan potensi memajukan desa. (Fitrianto et al., 2020) menggunakan metode ini untuk meningkatkan daya saing toko kelontong untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan ketat.

B. ENVIRONMENTAL SCANNING (ES)

Environmental scanning (ES) atau pemindaian lingkungan merupakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyebaran informasi dari internal dan eksternal organisasi kepada tokoh kunci organisasi. Kegiatan ini terdiri dari pemindaian *societal environment* dan *task environment*. *Societal environment* adalah lingkungan yang tidak akan memberi pengaruh pada komunitas, sementara *task environment* adalah lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi komunitas. *Environmental scanning* (ES) dilakukan dengan tujuan memahami lebih baik kondisi sosial, budayam ekonomi, dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan strategi pemberdayaan yang lebih efektif.

Pemberdayaan masyarakat dengan metode ini dilakukan dalam konservasi tanaman obat untuk menunjang dalam penyediaan bahan baku produksi jamu tradisional di Desa Gogik (Parmin et al., 2022) *Environmental scanning* merupakan bagian integral dalam pemberdayaan masyarakat dengan membangun kemandirian dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki.

Environmental scanning merupakan salah satu metode sistemik yang dikembangkan untuk mendapatkan informasi tentang area spesifik dimana permasalahan terjadi dan lingkungan secara umum. Fokus area es diantaranya adalah faktor ekonomi, teknologi, budaya, politik, ekologi, dan sosial budaya. Metode ini menjadi salah satu tahapan yang dilakukan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menekan kasus perdagangan Perempuan yang dilakukan (Komunikasi Kementerian et al., 2013). *Environmetal scanning* juga merupakan bagian dari manajemen strategi yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan mendefinisikan

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). *Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Masyarakat Transformatif*. <https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Materi-PAR-P.-Agus.pdf>
- Al-Kautsari, M. M. (2019). ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT : STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT. *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278. <https://doi.org/10.24235/EMPOWER.V4I2.4572>
- Andriyani, I., Wahyuningsih, S., Hoesain, M., & Alfarisy, F. K. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Hulu Melalui Konservasi Sumber Daya Alam sebagai Antisipasi Bencana Kekeringan dan Banjir Sepanjang Tahun di Kabupaten Jember. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 538–544. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.314>
- Ardiana, A., Afandi, A. T., Rohmawati, N., & Masahida, A. D. (2021). Focus Group Discussion Dalam Peningkatan Pengetahuan Kader Untuk Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Pencegahan Stunting Sejak Dini. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Royal)*, 4(3), 225–230. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i3.973>
- Arifiyanti, N., Kurniyanto, I. R., & Destiarni, R. P. (2023). PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN FASILITAS PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKALAN. *Agriscience*, 3(3). <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriscience>
- Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah Participatory Action Research. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 30–47. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i1.34144>
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). *Participatory Rural Appraisal for Corporate Social Responsibility*. Deepublish.
- Darmawan, D., Alamsyah, P., Jurusan, I. R., Nonformal, P., Keguruan, F., Pendidikan, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Artikel, I. (2020). Participatory Learning and Action untuk Menumbuhkan Quality of Life pada Kelompok Keluarga Harapan Di Kota Serang. *Journal of*

Nonformal Education and Community Empowerment, 4(2), 160–169.
<https://doi.org/10.15294/pls.v4i2.41400>

Fitrianto, A. R., Amaliyah, E. R., Safitri, S., Setyawan, D., & Arinda, M. K. (2020). Pendampingan dan Sosialisasi pada Usaha Toko Kelontong dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi Usaha Toko Kelontong. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 579–591.
<https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.120>

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2019). MODEL PARTICIPATION ACTION RESEARCH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *AKSARA*, 6(1). <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>

Hajar, S., Tanjung, I. S., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Hudayana, B., Kutanebara, P. M., Setiadi, A., Indiyanto, Z., Fauzanafi, M., Dyah, F. N., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 99–112.

Ikhsan, Z., Hidrayani, H., Winarto, W., Yusniwati, Y., Yunita, R., Sandi, N., Wahyuni, S., Nofialdi, N., & Reflinaldon, R. (2021). Focus Group Discussion Masalah Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanaman Pohon Bambu di Salingka Kampus Universitas Andalas. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 28(4), 428–434.
<https://doi.org/10.25077/jwa.28.4.428-434.2021>

Indrawati, D. R., Afri Awang, S., Rahayu Faida, L. W., & Ahmad Maryudi. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro : Konsep dan Implementasi. *Kawistara*, 7(2), 17–2016.

Indrizal, E. (2017). DISKUSI KELOMPOK TERARAH Focus Group Discussion (FGD) (Prinsip-Prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan). *Jurnal Antropologi : Isu Isu Sosial Budaya*.

Istriningsih, Hilmiati, N., & Jamal, E. (2012). PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA) APPROACH FOR THE ACHIEVEMENT OF A SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: LESSONS LEARNED FROM A PILOT ROLL-OUT (PRO) PROJECT

IN EAST NUSA TENGGARA (NTT) PROVINCE, INDONESIA.
International Journal of Sustainable Development, 04(10).

- Juniawan, F. P., Marini, M., Sylfania, D. Y., Antonius, F. R., & Gautama, S. (2021). Penerapan Metode Participatory Learning and Action (PLA) pada Pelatihan Uji Kompetensi Kejuruan. *JKPMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 2(4), 257–265. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v2i4.215>
- Kamelia, M., & Pawhestri, S. W. (2021). PEMBERDAYAAN PETANI KARET DESA ADI MULYO DENGAN PENDEKATAN ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3288–3300. <https://doi.org/10.31764/JMM.V5I6.5757>
- Kinasih E A A J, P., Septian, M. S., Erly Yeniska Hermitasari, & Farka Alfa Centauri. (2023). Community Empowerment Program by PT Pertamina Patra Niaga DPPU Ngurah Rai. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 84–93. <https://doi.org/10.55381/jpm.v2i2.115>
- Komunikasi Kementerian, S., Perempuan, P., Perlindungan, D., Untuk, A., Kasus, M., Perempuan, P., & Septiana, V. (2013). *73 KAJIAN MEDIA DAN BUDAYA POPULER* (Vol. 7, Issue 2).
- Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). PENERAPAN TEKNIK PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN SAMPAH. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/30953>
- Maulana, M. (2019). ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT : Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278. <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower>
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 3(2).
- Nurul Qomar, M., Dara, L., Karsono, P., Aniqoh, F. Z., Aini, C. N., Anjani, Y., & Bisnis, F. E. (2022). PENINGKATAN KUALITAS UMKM BERBASIS DIGITAL DENGAN METODE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR). *Community Development Journal*, 3(1), 74–81.

- Nurwati. (2014). EVALUASI PLA (PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION) MALARIA. *Jurnal MKMI*, 193–199.
- Parmin, P., Rusilowati, A., & Rahayu, E. F. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Tanaman Obat untuk Menunjang Penyediaan Bahan Baku Produksi Jamu Tradisional. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.46843/jmp.v1i1.263>
- Sudaryanti, S., Soemarno, Marsoedi, & Bagyo, Y. (2021). Perencanaan Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai: Landasan Berfikir Ekosistem Akuatik Berkelanjutan. *The Indonesian Green Technology Journal*. <https://doi.org/10.21776/ub.igtj.2021.009.01.01>
- Prasetyo, A., Nurkholik, & Fauzi, M. (2023). UPAYA PENGEMBANGAN POTENSI DESA BAHARI DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL. *Jurnal Abdimas Ekonomi Terapan*, 1(1). <https://jamet.uniss.ac.id/index.php/home/article/view/2>
- Priyatoro, D. E., Roza, A. S., Kesuma, T. A. R. P., Andianto, A., Wahyuni, S., Ciciria, D., Zuhad, M. A., Mahya, M. N., Ayyuhda, C., Naim, M. H., & Janah, M. (2020). Pemberdayaan masyarakat Pekon Negeri Ratu Tenumbang dalam mewujudkan wilayah tanggap bencana. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 135–146. <https://doi.org/10.21831/jppm.v7i2.31223>
- Ridwan, I., Dollo, A., & Andriyani, A. (2019). Implementasi Pendekatan Participatory Rural Appraisal pada Program Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(2), 88–94. <https://doi.org/10.15294/pls.v3i2.34913>
- Riwayati, Y. I., Okky Mabruri, M., & Pradana, T. A. (2020). “MANASUKA” MASYARAKAT NAMPU MANFAATKAN SUMUR KAPUR SEBAGAI EDUKASI PEDULI KELAYAKAN AIR MINUM DENGAN ALAT FILTRASI UNTUK HIDUP SEHAT MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DESA TERISOLIR. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 6(1). <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Saptaria, L., Astuti, R., Habibi, I., Shobirin, R. A., & Setyawan, F. (2021). EDUCATIONAL AND TECHNICAL ACCOMPANIMENT OF INDUSTRIAL WASTE PROCESSING MANAGEMENT OF BLACK

GRASS JELLY INTO ORGANIC FERTILIZER TO INCREASE PRODUCTION CAPABILITIES UD RSA KEDIRI. *European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA)*, 2(7). <https://www.scholarzest.com>

Silmi, A. F. (2017). PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA) DI DESA TERPENCIL: Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo, Sumatra Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05>

Supriatna, A. (2014). RELEVANSI METODE PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Lingkar Widya Iswara*, 1(1), 39–45. www.juliwi.com

Susanti, E., Monica, D. R., Haryati, D., & Tamza, F. B. (2022). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan focus group discussion (FGD) pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi pada aparatur desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sumbangsih*, 3(2), 103–106.

Thomas, S. (2012). *What is Participatory Learning and Action (PLA): An Introduction*.

Tri Kurniawan Badang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Y. (n.d.). *Strategi Penerapan Model Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Rentan Miskin di Pedesaan Application Strategy of Community Empowerment Institution Models to Reduce the Number of Vulnerable Household in Rural Areas*. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i1.325>

Wahyudi, D., Hakim, N., & Elwandari, N. (2020). PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION: PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI ERA NEW NORMAL. *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 196–223. www.e-journal.metrouniv.ac.id

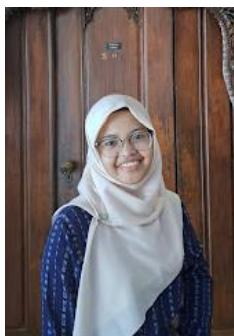
Yulian, J., Adi, S. A., & Rachmi, I. S. (2022). PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM BAHARI SEMBILANG

MANDIRI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INISIATIF LOKAL.
Jurnal Locus, 1(7). <https://doi.org/10.36418/locus.v1i7.168>

Efendi, M. Y., Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifatu, W. O., Arief, A. S., Sifatu, W. O., Ginting, S., Astuti, R., Sutarman, Saptaria, L., Setyawan, W. H., & Nurhidayah, R. E. (2021). *METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Polije Press.

Yuwana, S. I. P. (2022). Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service):Sasambo*, 4(3), 330–338. https://journal-center.litpam.com/index.php/Sasambo_Abdimas/article/view/735/501

PROFIL PENULIS



Tini Adiatma, M.Sc. Lulus S2 di Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini berkarir sebagai dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Musamus, Merauke, Papua Selatan, sejak tahun 2022. Saat ini aktif melakukan tridharma perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian maupun pengabdian.

Email : tiniadiatma@unmus.ac.id

BAB 7

POTENSI DAERAH DITINJAU DARI KONDISI DEMOGRAFIS

Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si.
Universitas Kristen Tentena

A. PENDAHULUAN

Salah satu indikator utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang handal adalah satu-satunya cara sebuah negara dapat dianggap maju. Sumber daya manusia yang handal adalah satu-satunya cara sebuah negara dapat mengolah dan memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun sebuah negara memiliki banyak sumber daya alam, namun kekurangan sumber daya manusia yang memadai akan membuat negara itu tidak maju.

Kualitas tenaga kerja memengaruhi tingkat produktivitas sehingga sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan demikian karena tenaga kerja adalah sumber daya yang melakukan proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

Sumber daya manusia dalam perekonomian selalu menarik untuk dibahas. Di antara masalah tersebut adalah seberapa penting sumber daya manusia untuk ekonomi atau kesejahteraan perusahaan, bagaimana keterampilan pekerja berhubungan dengan kinerja mereka, sifat pekerjaan yang berubah, teknik pengembangan sumber daya manusia, dan nilai investasi sumber daya manusia.

Pada bab ini akan ditunjukkan pemetaan potensi daerah berdasarkan kondisi demografis. Dalam menganalisis tren populasi dan membuat keputusan kebijakan yang tepat, studi tentang demografi sangat diperlukan. Dengan memahami pola demografi seperti angka kelahiran, angka kematian, migrasi, dan struktur usia penduduk, pembuat kebijakan dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya, merencanakan masa depan, dan mengatasi potensi tantangan yang mungkin timbul seiring dengan pertumbuhan populasi. Variabel demografis, seperti distribusi usia, angka kelahiran, angka kematian, dan kelangkaan sumber daya, harus dipertimbangkan dengan hati-hati saat membuat prediksi tentang pertumbuhan populasi.

Pada tahun 2045, 64% dari penduduk Indonesia akan menjadi angkatan kerja produktif, dengan sekitar 2 juta usia produktif masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahun. Ini adalah angka bonus demografi yang diproyeksikan oleh pemerintah indonesia dan juga para ahli. Generasi Z dan Millennial, yang berusia 8 hingga 39 tahun, akan menjadi mayoritas penduduk Indonesia.

Pengembangan kualitas SDM menjadi sangat penting untuk memaksimalkan potensi bonus demografi tersebut.

B. JUMLAH PENDUDUK INDONESIA

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi saling berhubungan dan memainkan peran penting dalam pembangunan suatu masyarakat. Populasi yang lebih besar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan angkatan kerja yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan merangsang kegiatan ekonomi. Populasi yang besar dapat menyediakan tenaga kerja yang beragam. Populasi yang besar dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan angkatan kerja dan pasar konsumen yang lebih besar (Wunarlan et al., 2023). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia melalui data Statistik Indonesia Dalam Angka Tahun 2023 terlihat bahwa tiga wilayah dengan jumlah penduduk terbesar berada di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah (Gambar 7.1).

C. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA

Jumlah penduduk juga tentunya didukung oleh laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing daerah. Laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahun selama periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk ini pada dasarnya dan sebagian besar berasal dari peningkatan angka kelahiran. Pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi pertanda baik jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang merupakan salah satu potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umum. Namun demikian kondisi ini akan menjadi ancaman apabila tidak terkelola dengan baik seperti peningkatan lapangan pekerjaan. Di Indonesia sendiri pada tahun 2010-2020 laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Provinsi Papua barat dan Papua dimana laju pertumbuhannya berada pada kisaran 3% - 4%. Sedangkan pada tahun 2020-2022 laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Riau yakni 3,15% (Gambar 7.2)

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Hasan, M., Nasution, Sofyan, Guampe, F. A., Rahmah, N., Mendo, A. Y., Elpisah, Musthan, Z., Sulistyowati, R., Kamaruddin, C. A., Ratnah, Sartika, S. B., Suarlin, Astuty, S., Khasanah, U., Supatminingsih, T., Tahir, T., Hasyim, S. H., Ahmad, Muh. I. S., ... Atirah. (2023). *Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia: Menggagas Peran Pendidikan Dalam Membentuk Modal Manusia*. Penerbit Tahta Media Group.
- Limanseto, H. (2023). Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5196/wujudkan-visi-indonesia-emas-2045-pemerintah-luncurkan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2025-2045>
- Setiawan, S. A. (2019). Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34>
- Wunarlan, I., Soetomo, S., & Rudiarto, I. (2023). The Morphology of Urban Agriculture of Marisa District, Indonesia. *Civil Engineering and Architecture*, 11(1), 412–424. <https://doi.org/10.13189/cea.2023.110133>

PROFIL PENULIS



Dr. Feliks Arfid Guampe, S.E., M.S

Penulis adalah putra daerah Sulawesi Tengah yang lahir pada 08 Januari 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, tahun 2012. Pada tahun 2013 memperoleh gelar Magister Sains Studi Pembangunan di Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga, Jawa Tengah. Penulis berkat beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui program beasiswa BUDI-DN LPDP dapat Meraih gelar Doktor Pendidikan Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tahun 2021. Penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) di kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi pembangunan, pembangunan perdesaan dan ekonomi pertanian. Oleh karena itu penulis aktif dalam melakukan berbagai penelitian serta publikasi jurnal nasional maupun internasional serta menulis buku terkait dengan bidang kepakaran tersebut. Buku yang ditulis dan telah dipublikasikan adalah buku berjudul Dinamika Usaha Tani perkebunan, buku berjudul Literasi dan Perilaku Sosial Ekonomi Petani Perdesaan serta beberapa book chapter.

Email: feliksguampe@gmail.com

BAB 8

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS

**Nurliyani, S.S.T.,M.Kes
Univeristas Malahayati**

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya mampu atau berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi tersebut agar menjadi nyata.

Secara konseptual, pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Sedangkan secara teoritis pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan individu atau kelompok lemah dalam masyarakat yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun social.

Pemberdayaan juga diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Lebih lanjut, pemberdayaan juga diartikan sebagai serangkaian proses menyeluruh antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses system sumberdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginan mereka, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya terkait dengan pekerjaannya, maupun aktivitas sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan atau masalahmasalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan terutama sebagai usaha untuk

membangun kemandirian masyarakat. Kemandirian dalam konteks ini mempunyai makna bahwa masyarakat mampu menformulasikan sendiri kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas penyelenggaraan aktifitas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri.

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk mampu dan berani bersuara, menyuarakan pendapat, ide, atau gagasangagasananya, serta keberanian untuk memilih sesuatu, seperti konsep, metode, produk, tindakan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat itu sendiri, yang mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial, kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, dimana sebagai sebuah proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan pemberdayaan sebagai suatu tujuan, menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu meyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses Pemberdayaan Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar mereka menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut :

1. Kampung wisata

Memunculkan ide bagi masyarakat di kota atau wilayah tertentu untuk membuat wilayah tersebut menjadi destinasi wisata, misalnya Kampung Warna Warni di Kota Malang.

2. Pelatihan UMKM

Dengan perkembangan teknologi, UMKM pun bertambah dengan sangat pesat. Dengan adanya UMKM di desa-desa, perekonomian masyarakat akan terbantu.

3. Pelatihan BUMDes

BUMDes merupakan suatu usaha desa berbadan hukum yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Modal dari usaha ini datang dari berbagai sumber seperti pemerintah, tabungan masyarakat, atau pinjaman.

4. Sanggar tari

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat setempat untuk menarik tari daerah yang sesuai dengan budaya setempat.

5. Pelatihan IT

Aparat desa yang bekerja di kantor desa ataupun kantor lingkungan haruslah memiliki kemampuan di bidang teknologi minimal bisa mengoperasikan komputer dan melakukan berbagai perintah dasar untuk Microsoft Office.

6. Peningkatan hasil panen

Langkah sosialisasi awal yang ditempuh pemerintah adalah memberikan motivasi kepada para petani untuk membuat saluran irigasi yang hemat supaya tanaman dapat tetap tumbuh sekalipun pada musim kemarau berkepanjangan.

7. Kelompok tani

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah mengusahakan dan mengajak anak-anak muda untuk kembali bertani dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang sudah maju. Kelompok tani adalah kumpulan beberapa petani di sebuah daerah yang bekerja sama dalam bidang pertanian demi menunjang efisiensi usaha.

8. Penyuluhan pertanian

Masih berhubungan dengan pemberdayaan sebelumnya, penyuluhan pertanian juga berhubungan dengan Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki potensi luar biasa dalam bidang pertanian. Penyuluhan pertanian

ini dilakukan atas dasar seringnya terjadi kasus dimana harga hasil panen yang terkadang tidak sesuai.

9. Posyandu

Posyandu adalah contoh pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang sudah sangat populer dan dapat dijumpai hampir di setiap desa.

10. Polindes

Polindes merupakan suatu usaha masyarakat untuk menyediakan tempat bersalin.

11. POD atau Pos Obat Desa

POD menyediakan obat bebas dan obat khusus untuk mengobati berbagai penyakit dengan harapan dapat membantu menunjang kesehatan masyarakat setempat.

12. Kampung Inggris

Hal ini sangat menguntungkan warga kampung Inggris. Selain mendapatkan edukasi yang baik di bidang bahasa Inggris, mereka juga dapat menghasilkan uang dari kemampuan tersebut.

13. Pelatihan saham dan finansial

Awareness saham, investasi, dan finansial agaknya menjadi bekal yang sangat penting bagi anak muda. Maka, pelatihan yang satu ini pun kerap dilakukan pada beberapa tahun belakangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam H, Y.,dkk.,2018. Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. SosiAL Poloitik, VII(1), 45-67.
- Adi Rukminto, 2013. Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto, Totok, Poerwoko Seobianto, 2013, Pemberdayaan Masyarakat, Bandung, Alfabeta.
- Nasdian, F.T, 2014, Pengembangan Masyarakat, Jakarta, Yayasan Pusat Obor Indonesia.
- Nasdin, Ferdian. 2015. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Obor.
- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Sulistiyani, A.T., 2004, Kemitraan dan ModelModel Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media.
- Willya Achmad. 2022. Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Zubaedi. 2016. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Kencana .
- Zulkarnain.,dkk., 2022. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Pengelola Desa Wisata. Madiun : Bayfa Cendekia Indonesia.

PROFIL PENULIS



Nurliyani, S.S.T., M.Kes, merupakan dosen pengajar di Program Studi Kebidanan Universitas Malahayati Penulis lahir di Metro, 3 Agustus 1992, Riwayat pendidikan dimulai dari Diploma III Kebidanan yang ditempuh selama 3 tahun (2010-2013) di Akademi Wira Buana, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Diploma IV Bidan Pendidik Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan lulus tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Malahayati Bandar Lampung dan selesai tahun 2019. Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menulis beberapa buku ajar maupun buku referensi.

Email : nurliani@malahayati.ac.id

BAB 9

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG PENDIDIKAN

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memerlukan pendidikan atau “*homo educandum*”. Manusia disebut sebagai *homo educandum* kerana manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik. Manusia dikategorikan sebagai “*animal educabil*” yang sebangsa binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang selain manusia hanya dapat dilakukan melalui latihan sehingga dapat mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis (tidak berubah) (Laundon et al., 2020).

Mengapa manusia perlu dididik? Pertanyaan ini memiliki dua dimensi penting yang dapat dijelaskan. Pertama, dari perspektif sosial, dan kedua, dari sudut pandang individual. Dalam perspektif sosial, pendidikan berfungsi sebagai pembawa dan pelindung warisan budaya dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda, memastikan kelangsungan hidup masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai budaya yang ingin diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjaga agar identitas masyarakat tetap terjaga. Dari segi individu, pendidikan berperan dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi tersembunyi yang dimiliki oleh setiap individu. Misalnya, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, penguatan dimensi spiritual, serta potensi lainnya. Potensi-potensi tersebut harus diupayakan untuk dikembangkan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan pengetahuan yang tepat, manusia berusaha melindungi dan memajukan kehidupannya. Pengetahuan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, mengalir ke dalam moral, dan pada akhirnya membentuk etika hidup. Etika ini mencerminkan kecenderungan untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan perkembangan kehidupan secara keseluruhan. Di dalam konsep perilaku ini, terkandung nilai-nilai keadilan yang merentang ke arah diri sendiri, sesama manusia, dan bahkan alam tempat kehidupan berlangsung. Sebab, tanpa pemahaman akan jati diri individu, seseorang tidak dapat menjalankan peran dan fungsi manusianya. Tanpa keberadaan manusia lain, individu tak akan mampu mempertahankan eksistensinya. Lebih jauh lagi, tanpa memanfaatkan potensi alam, manusia takkan bisa mencapai apa pun. (Laundon et al., 2020).

Sejak awal kelahirannya, manusia secara langsung terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Ia diurus, diawasi, dilatih, dan diajarkan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakatnya agar dapat mencapai kedewasaan dan

kematangan. Dalam perjalanan ini, ia mengembangkan potensi kemandirian untuk mengelola hidupnya. Proses pendidikan dan pembelajaran dimulai dengan cara-cara alami yang didasarkan pada pengalaman hidup, dan berlanjut ke metode formal dan sistematik seperti pendidikan di sekolah, dengan pendekatan konseptual dan rasional.

Setelah mencapai tingkat kedewasaan, individu tetap melanjutkan pendidikan untuk mematangkan diri. Pematangan ini melibatkan kemampuan untuk membantu diri sendiri, orang lain, serta menjaga keberlanjutan alam dalam ekosistemnya. Dengan kata lain, pematangan diri adalah bentuk pendidikan berkelanjutan, di mana manusia berusaha menjadi lebih bijaksana dalam sikap dan perilaku adil terhadap semua aspek kehidupan.

Pendidikan menjadi persoalan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai bagian dari kodratnya, pendidikan melekat dalam diri manusia. Setiap aktivitas kehidupan manusia memiliki dimensi pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan makan, minum, bekerja, beristirahat, berinteraksi sosial, beragama, dan lainnya. Antara manusia dan pendidikan memiliki hubungan kausal, di mana pendidikan adalah hal yang esensial bagi manusia dan sebaliknya, manusia juga penting dalam konteks pendidikan. Manusia didefinisikan sebagai "homo educandum," yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia dan setiap individu memerlukan pendidikan.

Pemahaman "homo educandum" mencakup tiga subpredikat lainnya: "homo educandee" (makhluk yang terdidik), "homo educabile" (makhluk yang dapat dididik), dan "homo educandum" (makhluk yang memerlukan pendidikan). Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi individu dan membentuk karakter serta peradaban bangsa, dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, berilmu, sehat, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan perkembangan manusia menuju kedewasaan. Konsep ini muncul karena manusia memiliki tiga prinsip antropologis dasar: historisitas (keterkaitan masa lalu dan masa depan dalam eksistensi manusia), idealitas (usaha untuk menjadi manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, F. R., & Nasution, S. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendidikan, Agama, Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan. Qardhul Hasan: Media pengabdian kepada masyarakat, 3(1), 61-73.
- Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial dan pendidikan. Jurnal Pendidikan Nonformal, 14(1), 1-11.
- Laundon, M., Cathcart, A., & Greer, D. A. (2020). Teaching Philosophy Statements. *Journal of Management Education*, 44(5), 577–587.
- Supsiloani, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 5(1), 20-30.

PROFIL PENULIS



Dr. Uswatun Khasanah M.Pd.I., CPHCEP lahir di Sukoharjo, pada 07 April 1988, Putri Pertama dari Alm. Bapak Rochmad S.Ag dan Ibu Rohmah Suniyati. Pendidikan terakhir Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta 2022.

Penulis Buku dan Peneliti di Bidang Pendidikan merupakan kegiatannya. Selain itu penulis merupakan Founder Penerbit Tahta Media Group. Penulis juga aktif di Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia (ADPETIKISINDO) selaku Bendahara Umum periode 2020-2025 Buku dan Artikel yang pernah ditulis oleh penulis bisa dilihat melalui: <https://scholar.google.com/citations?user=UAlcP6wAAAAJ&hl=id> atau ID Sinta Penulis (6724697). Penulis dapat dihubungi melalui Email uzwa.staimklaten@gmail.com

BAB 10

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KESEHATAN

Dr. H. Miftahul Munir, SKM.,M.Kes.,DIE
Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban

A. DEFINISI KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Nurbeti, M. 2009).

Pemberdayaan masyarakat terhadap usaha kesehatan agar menjadi sehat sudah sesuai dengan Undang – undang RI, Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya. Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan (Nurbeti, M. 2009).

Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan (Supardan, 2013).

Pengertian Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Memampukan masyarakat, “dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri (Nurbeti, M. 2009).

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat atau komunitas merupakan salah satu dari

strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (*empowerment*) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai *primary target* memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui tentang manajemen pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (Notoatmodjo, 2007).

Sulistiyani (2009) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Nurbeti, M. 2009).

Gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam peningkatan kemampuan masyarakat guna mengangkat harkat hidup, martabat dan derajat kesehatannya. Peningkatan keberdayaan berarti peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengembangkan diri dan memperkuat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemajuan (Nurbeti, M. 2009).

Gerakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini tepatnya ditujukan pada sasaran primer agar berperan serta secara aktif (Supardan, 2013).

Bidang pembangunan biasanya meliputi 3 (tiga) sektor utama, yaitu ekonomi, sosial (termasuk di dalamnya bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya), dan bidang lingkungan. Sedangkan masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmat, 2001. Masyarakat dalam Kesehatan. Agung Sentosa. Jakarta.
- Kartasasmita, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan*. <Http:wpdprss.masyarakat.co.id>. Diakses tanggal 10 Oktober 2014.
- Notoatmodjo, S. 2007, *Promosi kesehatan & ilmu perilaku*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurbeti, M. 2009. *Pemberdayaan masyarakat dalam konsep “kepemimpinan yang mampu menjembatani”*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Riskiadi, L., 2012. *Makalah Pemberdayaan Masyarakat*. <http://kesmasode.blogspot.com/2012/10/makalah-pemberdayaan-masyarakat.html> diakses tanggal 11 Oktober 2014.
- Salman Darmawan. 2002, *Apa Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah, PSKMP Unhas, Makassar.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Supardan,I., 2013 *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. <http://doktergigi-semarang.blogspot.com/2013/06/pemberdayaan-masyarakat-bidang-kesehatan.html>. Diakses tanggal 11 Oktober 2014.
- Suriyatman, 2009. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Nuha Medika, Yogyakarta.
- Wahyudi, B. 2012. *Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Konsep Dalam Upaya Menekan Penyalahgunaan Narkoba (Pusat Promkes, 2005)*. Diakses tanggal 10 Oktober 2014.
- Zulkarnain, Febri. 2017. *Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara.

PROFIL PENULIS



Penulis Lahir di Kabupaten Lamongan Jawa Timur pada tanggal 12 April, riwayat pendidikan D-III Keperawatan dr Soetomo Surabaya lulus tahun 1993, Sarjana Kesehatan Masyarakat universitas airlangga Surabaya lulus tahun 1999, Magister Kesehatan Masyarakat universitas airlangga lulus tahun 2002, Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus tahun 2014, Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya lulus Tahun 2015. Riwayat Pekerjaan sebagai perawat ICU RSUD dr.Soetomo surabaya dan UGD RSAD Kodam V Brawijaya tahun 1993-1995, Perawat UGD RS Sumber Kasih Surabaya pada tahun 1994, sebagai dosen di SPK Depkes Surabaya di Tuban pada tahun 1996-2003, Direktur AKBID NU Tuban pada Tahun 2003-2008, Ketua STKes NU Tuban pada tahun 2008-2021, Rektor Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban tahun 2021 sampai sekarang. Saat ini juga penulis aktif sebagai surveyor di LAMFI, penulis juga sudah menghasilkan karya – karyanya dalam beberapa judul buku diantaranya buku Monograf Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Kinerja Perawat tahun 2020, Buku Community Nursing Center sebagai pendekatan keperawatan komunitas tahun 2021 dll, penulis juga sebagai reviewer jurnal nasional selain itu penulis juga aktif melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB 11

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI

Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si.
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

A. PENDAHULUAN

Ditengah ketatnya suasana persaingan global dan domestik dalam menyongsong abad Indonesia Emas tahun 2025, baik pada tataran negara dan perusahaan maupun pada tataran individu, maka pengembangan aspek kewirausahaan dalam meningkatkan kapasitas daya saing menjadi salah satu faktor kunci dalam memenangkan persaingan. Persepsi kewirausahaan dari berbagai ahli cukup banyak, antara lain Thomas W. Zimmerer yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Sedangkan Andrew J. Durbin mengatakan bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif.

Kewirausahaan merupakan proses penting dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang untuk mengurangi pengangguran dan mempertahankan daya saing negara dalam menghadapi efek globalisasi. Tantangan yang berdampak pada negara berkembang membutuhkan pendidikan kewirausahaan untuk menjadi bidang pendidikan yang paling cepat berkembang (Sirelkhatim & Gangi, 2015). Pendidikan kewirausahaan di Malaysia dapat meningkatkan kompetensi dan potensi kewirausahaan siswa. Di Eropa pendidikan kewirausahaan yang berkualitas tinggi meningkatkan daya tarik karir anak muda dan melengkapi pengetahuan kewirausahaan yang meningkatkan niat berwirausaha dan mempengaruhi pola pikir mahasiswa untuk memulai usaha di sektor bisnis. Pendidikan tinggi di Indonesia hanya mampu menghasilkan pencari kerja tetapi sangat jarang yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan orang lain. Pencari kerja yang dihasilkan tetapi tidak siap pakai baik secara pengetahuan, keterampilan, sikap dan bentuk. Sehingga para lulusan lebih memilih untuk mencari pekerjaan daripada menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Fenomena ini berdampak pada rendahnya intensi berwirausaha di Indonesia (Indarti & Rostiani, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi tenaga kerja yang profesional.

Pendidikan merupakan alat untuk menemukan Pengembangan kurikulum pada bagian ini merupakan salah satu dukungan berbasis pendidikan untuk meningkatkan keterampilan lulusan. Penelitian tentang kewirausahaan mendukung perencanaan dan kebijakan yang tepat dalam pengembangan ekonomi. Pendidikan kewirausahaan merupakan hal yang penting untuk membantu meningkatkan niat kewirausahaan (Nowinski, Haddoud, Lancaric, Egerova & Czegledi, 2017). Tidak hanya itu, pendidikan ini dapat memberikan pengetahuan, sikap, dan aspirasi generasi muda milenial terhadap kewirausahaan. Penelitian kewirausahaan sebagai produksi ilmiah yang menjelaskan pengetahuan kewirausahaan tentang masalah ekonomi dan sosial di masyarakat (Naderibeni et al., 2020).

Di Indonesia untuk membuat semangat berwirausaha dilakukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 dengan menyatakan "Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan". Berdasarkan pernyataan tersebut, pada tahun 2008 Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program gerakan kewirausahaan untuk siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi (Murtini, 2008). Setelah itu, sejak tahun 2009 seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus memasukkan mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah wajib. Namun demikian, pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada mahasiswa masih menjadi perdebatan mengenai ketepatan dan keefektifan metode pengajaran kewirausahaan. Pembelajaran kewirausahaan membutuhkan aspek teoritis dan pengetahuan praktis untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan praktis bagaimana memulai bisnis.

B. ANALISIS ISU

Di era saat ini, jiwa kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini. Tidak hanya pada kalangan pengusaha saja. Sebenarnya, kita sejak lahir sudah dikenalkan dan diajarkan mengenai karakter jiwa kewirausahaan mulai dari diajarkan mandiri, tanggung jawab, jujur, berani, kreatif dan juga integritas. tetapi semakin bertambahnya usia, pemahaman kita tentang hal tersebut banyak yang semakin tergerus. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengangguran intelektual yang telah menjadi sarjana tapi masih belum memiliki pekerjaan. Selain itu, banyak lulusan kampus kenamaan yang setelah

DAFTAR PUSTAKA

- Dehghanpour, A. (2013). The process of impact of entrepreneurship education and training on entrepreneurship perception and intention: Study of educational system of Iran. *Education and Training*, 55(8-9), 868-884. doi:10.1108/ET-04-2013-0053.
- Dewobroto, W. S. (2013). Penggunaan Business Model Canvas Sebagai Dasar Untuk Menciptakan Alternatif Strategi Bisnis dan Kelayakan Usaha. *Jurnal Teknik Industri*, 1(2), 215–230.
- Doppelt, Y. (2003). Implementation and assessment of project-based learning in a flexible environment. *International journal of technology and design education*, 13(3), 255-272. doi:10.1023/A:1026125427344.
- Fayolle, A., & Gailly, B. (2015). Fayolle, A., & Gailly, B. (2013). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: Hysteresis and persistence. *Journal of Small Business Management*, 53(1), 75- 93. doi:10.1111/jsbm.12065.
- Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science approach (Doctoral dissertation, Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales).
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.

PROFIL PENULIS



Ni Putu Ari Aryawati, lahir di Mataram, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada 05 Maret 1993. Telah menempuh pendidikan S-1 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Mataram tahun 2015 dan pendidikan S-2 pada Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Udayana Tahun 2017. Saat ini, di tahun 2023 penulis merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya. Penulis saat ini terdaftar sebagai salah satu dosen Akuntansi di Program Studi Ekonomi Hindu, IAHN Gde Pudja Mataram sejak tahun 2019. Penulis aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, seperti seminar, konferensi, workshop, dan lain-lain, baik nasional maupun internasional. Beberapa tulisan penulis telah dimuat antara lain; *Resiliensi Bisnis Pada UMKM Di Era Normal Baru Sebagai Upaya Kemandirian Ekonomi* dalam buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin pada tahun 2020; *Digital Tourism: Strategi Menarik Wisatawan Millenial Ke NTB* yang terbit dalam jurnal ilmiah Hospitality pada tahun 2020; *Increasing Corporate Value Through Managerial and Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure* dalam International Journal Of Social Science and Business pada tahun 2020; *Online Banten as An Opportunity Business To Improve Economics Of Hindu Society Carry Out Society 5.0 and Golden Indonesia* pada prosiding seminar nasional STAHN Gde Pudja Mataram tahun 2020; dan *Mompreneur Sebagai Upaya Meningkatkan Kreatifitas Dan Alternatif Bisnis Di Masa Pandemi* dalam buku Tetap Aktif dan Inovatif di Tengah Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Keakitifan penulis dapat dilihat pada *google scholar* maupun akun sinta an Ni Putu Ari Aryawati. Penulis dapat dihubungi via email npariaryawati@gmail.com atau WA 081917124281.

BAB 12

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN

Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara agraris di mana mata pencaharian penduduknya banyak di bidang pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 40,64 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2022. Jumlah itu porsinya mencapai 29,96% dari total penduduk bekerja yang sebanyak 135,61 juta jiwa, sekaligus menjadi yang terbesar dibanding lapangan pekerjaan utama lainnya (Kusnandar, 2022).

Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia. Di Negara agraris pertanian memiliki peranan yang sangat penting baik dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok maupun dalam bidang perekonomian. Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas angkatan kerja di Indonesia.

Setiap kehidupan manusia mengandung aktivitas konstruktif pertanian. Selama makanan diperoleh melalui produksi pertanian, akan selalu ada hubungan yang erat antara pertanian dan kemanusiaan. Pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia berjalan beriringan dengan pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan pertumbuhan, pembangunan, dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan, maka pembangunan pertanian secara lebih luas dipahami sebagai proses perubahan sosial menuju kemajuan.

Menurut (Plangiten et al., 2019) Pertanian adalah praktik mengolah tanah dengan tanaman yang pada akhirnya akan menghasilkan produk yang dapat dipanen, dan praktik pertanian melibatkan campur tangan manusia dengan tanaman asli dan siklus hidupnya. Dalam pertanian kontemporer, intervensi ini berbentuk bahan kimia pertanian, seperti pupuk kimia, insektisida, dan bahan tambahan tanah lainnya, yang lebih jauh lagi. Pertanian alternatif, yang berusaha untuk menyembuhkan kondisi tanah yang tidak sehat, sedang dikembangkan oleh banyak profesional pertanian dan organisasi non-pemerintah di seluruh dunia. Membangun kesuburan tanah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan tanah. Hal ini dilakukan dengan

meningkatkan kandungan bahan organik menggunakan kebijaksanaan konvensional atau dengan menggunakan input dari usaha tani (on-farm input).

Di Indonesia, sebagian besar mata pencarihan tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Tujuan pembangunan pertanian antara lain meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan gizi rumah tangga dan ketahanan pangan, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan. Mayoritas kehidupan masyarakat di pedesaan bergantung pada hasil panen (Zatnika, 2022).

Oleh karena itu, sangatlah penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian yang mayoritas tenaga kerja petani di Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberdayakan wilayah perdesaan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai prakarsa dan proyek swadaya, perbaikan lingkungan dan perumahan, penciptaan bisnis desa dan lembaga keuangan, serta prakarsa yang dapat membantu masyarakat menghasilkan lebih banyak. Produksi (Dani, 2017).

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sejalan dengan hakikat masalah prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan penggunaan sumber daya untuk mengembangkan masyarakat desa. kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Zatnika, 2022).

Dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sejalan dengan hakikat masalah prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan penggunaan sumber daya untuk mengembangkan masyarakat desa. kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undangundang tersebut Pasal 18 yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam pembangunan melalui kewenagan yang dimilikinya dan Peraturan Menteri Nomor 67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, memiliki keterikatan dan keterkaitan dimana sama-sama bertujuan untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Dani, I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jaimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 03(1), 49–61.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i1.648>
- Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 5(4), 460–473.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3045>
- Muizu, W. O. Z., Sari, P. Y., & Handani, W. L. (2019). Peranan Kelompok Wanita Tani (KWT) Tali Wargi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Citali, Kabupaten Sumedang. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 151–164.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3593>
- Muniroh, N. A., Nugraha, B. S. P., & Purnaningsih, N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan: Studi Kasus Desa Nambo Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(3), 435–444.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/31307>
- Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan. *Osf*.
https://www.researchgate.net/publication/331311483_Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan%0Ahttps://www.academia.edu/38428570/Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan
- Plangiten, N. N., Mandarasi, F., & Ruru, J. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sektor Pertanian Di Desa Kalipitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 89–98.
- Ratnawati, R., Mappamiring, M., & Mone, A. (2018). Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Paccing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(3), 342.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1057>
- SUNARTI, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian

Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. In *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2, Issue 3, pp. 773–783). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2750>

Wahyuni, F., & Lanin, D. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian (Studi di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan). *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 218–223. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.44>

Zatnika, A. R. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanegara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis*. 2208–2219. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanegara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis

Viva Budy Kusnandar, (2022). Sebanyak 30% Pekerja Berada di Sektor Pertanian pada Pebruari 2022 . <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/23/sebanyak-30-pekerja-berada-di-sektor-pertanian-pada-februari-2022>

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Hj. Marhawati, M.Si

Lahir di Birengere, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Juli 1963. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di kampung halamannya SDN Tonasa tahun 1975. Melanjutkan Pendidikan SMP Muhammadiyah di kota Ujung Pandang tahun 1979. Setelah tamat SMA NEGERI I Ujung Pandang tahun 1982, penulis melanjutkan studi S1 di Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (Ir) tahun 1987. Menyelesaikan S2 Program Studi Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (M.Si) tahun 1997. Selanjutnya penulis melanjutkan S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (Dr) tahun 2019.

Sejak tahun 1989 sampai 2010 penulis mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian hijrah ke Universitas Negeri Makassar tahun 2011, sampai saat ini penulis menjadi dosen tetap di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Beberapa buku telah dihasilkan baik berupa buku referensi, monograf, buku ajar maupun book chapter dan telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel yang terbit pada jurnal dan prosiding baik skala nasional maupun Internasional.

Email: marhawati@unm.ac.id

BAB 13

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PARIWISATA

Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M
Politeknik Pariwisata NHI Bandung

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan industri yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, dan mempromosikan budaya lokal. Namun, manfaat pariwisata tidak selalu terdistribusi secara merata di antara masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari industri tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi: Pemberdayaan masyarakat dapat mengarah pada penciptaan lapangan kerja, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Selain itu, juga dapat mengarah pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang dapat berkontribusi pada ekonomi lokal.
2. Manfaat sosial: Pemberdayaan masyarakat dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal. Ini juga dapat mengarah pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yang dapat memberi wisatawan pengalaman otentik dan membantu mempromosikan pertukaran budaya.
3. Manfaat lingkungan: Pemberdayaan masyarakat dapat mengarah pada pengembangan praktik pariwisata berkelanjutan, yang dapat membantu melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

Pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat industri didistribusikan secara merata. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, membentuk kemitraan, dan mempromosikan budaya lokal, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat dari industri ini dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutannya.

Beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata yang dapat dilakukan antara lain:

1. *Capacity building*: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat setempat untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata. Ini dapat mencakup pelatihan dalam bidang perhotelan, bahasa, dan pemasaran.

2. *Community-based tourism*: Melibatkan masyarakat setempat dalam industri pariwisata. Ini dapat mencakup penyediaan akomodasi, makanan, dan layanan pemandu wisata kepada wisatawan.
3. *Partnership*: Kerjasama antara masyarakat setempat, pemerintah, dan sektor swasta dapat membantu memastikan bahwa manfaat pariwisata didistribusikan secara adil. Ini dapat mencakup perjanjian pembagian pendapatan dan pengembangan infrastruktur pariwisata.
4. *Marketing*: Pemasaran dapat membantu mempromosikan budaya dan tradisi lokal, yang dapat menarik wisatawan yang tertarik untuk mengalami pengalaman budaya yang otentik.

Dengan memberdayakan masyarakat setempat melalui berbagai bentuk pemberdayaan di bidang pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

B. PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Ketika Bank Dunia mulai memikirkan cara menangulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata pada Juli 2000, lahirlah wacana pariwisata berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal dalam Bahasa Inggris dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT). Keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat akan mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membawa dampak positif bagi upaya pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat, sehingga dapat menimbulkan jati diri dan rasa bangga dari masyarakat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata (Prasasia, 2013).

Dalam pengembangan pariwisata di masyarakat yang heterogen, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat agar pengembangan pariwisata sesuai dengan nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Istilah yang umum untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Rakhman, 2014).

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pendekatan pembangunan yang menekankan pada ekonomi rakyat dan pemberdayaan rakyat (Prasasia, 2013: 95).

DAFTAR PUSTAKA

- Aunillah, Azza., Careza Rizky, Fahmi Anggriawan, H. D. (2011). *Proses Pengawasan dalam Manajemen*. Manajemen Bisnis Internasional-Polnes. <https://www.slideshare.net/UniSrikandi/proses-pengawasan-dalam-manajemen>
- Hall, C. M. (2017). Community involvement in tourism development and the value of social capital. In *Tourism and Social Capital* (pp. 51–68). Channel View Publications.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Kedua). BPFE.
- Liu, J., Var, T., & Leung, Y. (2019). Community-Based Tourism. In *Encyclopedia of Tourism*. Springer, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6>
- Prasiasa, D. P. O. (2013). *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Salemba Humanika.
- Rakhman, C. U. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (PBM) di Kabupaten Pangandaran*. Universitas Padjadjaran.
- Rakhman, C. U. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*.
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya (Community Empowerment: Can the Antithesis Appear)* (1st ed.). Pustaka Pelajar (Student Library).
- Suryadana, M. L. (2010). *Kelembagaan, Regulasi, dan Kemitraan*.
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5)
- The ASEAN Secretariat. (2016). ASEAN Community Based Tourism Standard. Asean, 255. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Community-Based-Tourism-Standard.pdf>

PROFIL PENULIS



Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M lahir di Kota Cimahi pada 29 Desember 1976. Jenjang pendidikan dasar ia tempuh di SDN Karang Mekar 9 Banjarmasin (1983-1989). Adapun jenjang Pendidikan menengahnya di SMPN 6 Banjarmasin (1989-1992) dan SMAN 4 Bandung (1992-1995). Kemudian ia kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) Prodi Manajemen Tata Boga (1995-1998). Pada 1999-2002 ia pernah bekerja sebagai koki kapal pesiar Italia dan Yunani. Sepulang dari bekerja di kapal pesiar, ia melanjutkan Pendidikan ke S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Jurnalistik di Universitas Padjadjaran (2002-2005). Lulus dari program S1, ia langsung melanjutkan Pendidikan ke Magister Manajemen Bisnis di Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis-Telkom Bandung yang sekarang menjadi Universitas Telkom (2005-2007). Pada 2008 ia diterima menjadi CPNS di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sekarang menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai penghubung di Pusat Informasi dan Humas. Pada 2010 ia pernah mendapatkan beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Thailand untuk mengikuti Program *International Tourism Short Course* – selama 23 hari di *Phuket Campus - Prince of Songkla University*, Thailand. Setahun kemudian mendapatkan beasiswa dari Kemenparekraf untuk melanjutkan Pendidikan Program Doktor di Fakultas Ilmu Budaya Konsentrasi Kajian Budaya Pariwisata di Universitas Padjadjaran (2011-2014). Pada 2015 ia memutuskan untuk pindah/mutasi ke STPB (sekarang menjadi Politeknik Pariwisata/Poltekpar NHI Bandung) yang juga berada di bawah Kemenparekraf untuk beralih jabatan dari Fungsional Umum menjadi Dosen. Sekarang kesibukannya selain menjadi dosen tetap di Poltekpar NHI Bandung, ia juga sering menjadi narasumber dan konsultan budaya pariwisata. Untuk berkorespondensi dapat melalui cecep.u.r@gmail.com.

BAB 14

KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sri Mumpuni Yuniarsih., S.Kep., Ns., M. Kep
Universitas Pekalongan

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses menemukan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan manusia. Pemberdayaan adalah proses dimana individu dan kelompok menerapkan kemampuan dan kapasitas untuk memahami dan menafsirkan masalah dan kebutuhan yang kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan melalui partisipasi aktif (Ani et al., 2017). Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sebagai strategi alternatif pemecahan masalah telah banyak digunakan meskipun pada kenyataannya belum diimplementasikan secara maksimal. Pemberdayaan masyarakat banyak diperbincangkan masyarakat karena berkaitan dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepannya, apalagi jika dikaitkan dengan keterampilan masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pemberdayaan merupakan bagian dari pembangunan. Paradigma pemberdayaan masyarakat yang memusatkan perhatiannya pada semua aspek pokok manusia dalam kehidupannya lingkungan, dari aspek intelektual (sumber daya manusia), material dan fisik, hingga aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi sosial budaya, ekonomi, aspek politik, keamanan dan lingkungan (Cristina, 2020)

Pemberdayaan masyarakat sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Pemberdayaan masyarakat ini sering digunakan menjadi sebuah terminology dalam pembangunan nasional yang berakar dari akar budaya masyarakat (Ir. Hendra Hamid, 2018). Pemberdayaan masyarakat sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip penting sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan prinsip demokratis, partisipatif, tidak diskriminatif,
2. adil dan tidak memaksa.
3. Pemberdayaan dilakukan sesuai kebutuhan sasaran.
4. Pemberdayaan harus berorientasi kepada masyarakat, mereka adalah subyek pemberdayaan.
5. Pemberdayaan menjunjung tinggi kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat setempat.
6. Pemberdayaan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dari hal yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks.
7. Pemberdayaan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

8. Pemberdayaan menggerakkan partisipasi masyarakat yang bersifat fisik maupun non fisik.
9. Pemberdayaan memiliki fasilitator yang kompeten terhadap bidang terkait.

Namun pemberdayaan masih seringkali hanya dipersepsikan sebagai program untuk menyalurkan finansial atau bantuan ke masyarakat, sehingga terkadang mengkaburkan definisi serta tujuan penting dari program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Menyusun menjalankan serta mengembangkan program pemberdayaan harus memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan agar segala sesuatu yang sudah direncanakan dapat tercapai.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari berbagai penelusuran pustaka dapat dijelaskan beberapa faktor seperti dibawah ini:

1. Ketepatan dalam proses perencanaan program

Program pemberdayaan akan berhasil jika sejak awal telah direncanakan secara tepat. Perencanaan yang baik akan memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut (Ir. Hendra Hamid, 2018):

- a. Identifikasi sistem sosial yang bersangkutan

Identifikasi sosial dapat bermanfaat untuk mengetahui nilai-nilai sosial budaya masyarakat, struktur kekuasaan dan kebiasaan atau perilaku masyarakat.

- b. Identifikasi tokoh kunci dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat.

Tokoh kunci baik formal maupun informal perlu diidentifikasi karena tokoh tersebut dapat membantu dalam pengembangan opini public yang akan menetukan tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat. Tokoh tersebut meliputi pimpinan formal masyarakat misalnya Camat, lurah, ketua RW ketua RT dst serta tokoh informal seperti pemuka agama, tokoh politik, pedagang, petani kaya dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Akramullah, M. A. (2018). *Faktor-Faktor Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Desa Transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Periode 2015-2017.* 57–63.
- Ani, F., Ramlan, N., Azman, K., Suhaimy, M., Jaes, L., Damin, Z. A., Halim, H., Syed, S. K., Bakar, A., & Ahmad, S. (2017). Applying Empowerment Approach in Community Development. *The 1st International Conference on Social Sciences University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, 1–2 November 2017 Toward Community, Environmental, and Sustainable Development* Fauziah Ani, et Al: Applying Empowerment Approach in Community Developmen, November, 503–510.
- Bakar, A. A. (2015). Analisis Determinan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8, 51–58.
- Cristina, H. M. (2020). Community Empowerment Program To Increase Community Income in Sitimulyo Village, Piyungan District, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(2), 128–134. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v21i2.9222>
- Daraba, D. (2015). Factors Affecting the Success Empowerment Program of the Poor. *Sosiohumaniora*, 17(2), 168–169.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Kementerian Kesehatan. (2020). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. In *Short Textbook of Preventive and Social Medicine*. https://doi.org/10.5005/jp/books/11257_5
- Kerebungu, F., & Fathimah, S. (2021). Community Empowerment at the Malalayang Dua Beach Tourism Object , Manado. *International Joined Conference on Social Science*, 603(Icss), 326–332.
- Luh, N., Dewi, Y., & Utama, M. S. (2018). ANALISIS DETERMINAN KEBERHASILAN PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU (GERBANG SADU) MANDARA DI KECAMATAN KARANGASEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (

Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Permasalahan yang dihadapi yang membutuhkan m. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(7), 2257–2284.

PMK No 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, (2018).

Nurcahyo, R. J. (2015). Keterkaitan Visi, Misi, Dan Values Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Kulit “Dwi Jaya.” *Jurnal Khasanah Ilmu*, 6(2), 87–94.

Rahmawati, Y. D., Purnaweni, H., & Taruna, T. (2016). Tahapan Pemberdayaan Masyarakatdalam Pengelolaan Lingkungan Di Desa Cangkringkecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. *Jurnal EKOSAINS*, 7(4), 83–93.
<https://jurnal.uns.ac.id/ekosains/article/view/61954/35855>

Snetro-Plewman, G., Tapia, M., Uccellani, V., Brasington, A., & McNulty, M. (2007). *Taking Community Empowerment to Scale*. [http://www.k4health.org/system/files/Taking community empowerment to scale.pdf](http://www.k4health.org/system/files/Taking%20community%20empowerment%20to%20scale.pdf)

Suryadi, D. (2019). Pentingnya Visi Dan Misi Dalam Mengelola Suatu Usaha. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 9(1), 17–35.
<https://doi.org/10.36769/asy.v9i1.53>

Tewu, M. E. (2015). PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS KELOMPOK TANI DI DESA TEMBER. *Acta Diurna*, IV(3).

Wastiti, A., Purnaweni, H., & Zarkasyi, A. (2020). FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG. *Jurnal Adminstrasi Publik*.

World Health Organization. (2018). *Traditional and Complementary Medicine in Primary Health Care*. 1–11.

PROFIL PENULIS



Sri Mumpuni Yuniarsih.,S.Kep.,Ns.,M.Kep

Penulis merupakan Dosen Keperawatan pada Program Studi S1 Keperawatan-Ners Universitas Pekalongan sejak tahun 2009. Sebagai seorang dosen penulis aktif melakukan tridharma perguruan tinggi baik pengajaran, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Penulis merupakan dosen di bidang keperawatan komunitas, penulis telah menghasilkan buku ajar yang disusun bersama dengan dosen seminat keperawatan komunitas Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia Regional 7 Jawa Tengah yang berjudul Konsep Keperawatan Komunitas. Penulis saat ini sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di FK-KMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan tema disertasi tentang pelayanan kesehatan tradisional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Email: unipekalongan@gmail.com

Bab 1 Kondisi Masyarakat Indonesia

Dr. Masdiana, S.T.,M.T. (Universitas Halu Oleo)

Bab 2 Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Gusman Arsyad, SST, M.Kes (POLTEKKES KEMENKES Palu)

Bab 3 Fungsi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si (Universitas Lakidende)

Bab 4 Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si (Universitas Riau)

Bab 5 Masyarakat Mandiri

Dr. Herlina Rasjid, S.E.,M.M (Universitas Negeri Gorontalo)

Bab 6 Metode Dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat

Tini Adiatma, M.Sc. (Universitas Musamus)

Bab 7 Potensi Daerah Ditinjau Dari Kondisi Demografis

Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si. (Universitas Kristen Tentena)

Bab 8 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas

Nurliyani, S.S.T.,M.Kes (Univeristas Malahayati)

Bab 9 Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pendidikan

Dr. Uswatin Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

Bab 10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

Dr. H. Miftahul Munir, SKM.,M.Kes.,DIE (Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban)

Bab 11 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi

Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si. (Institut Agama Hindu Negeri Gede Pudja Mataram)

Bab 12 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian

Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si (Universitas Negeri Makassar)

Bab 13 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pariwisata

Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M (Politeknik Pariwisata NHI Bandung)

Bab 14 Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat

Sri Mumpuni Yuniarsih., S.Kep., Ns., M. Kep (Universitas Pekalongan)



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896 5427 3996



ISBN 978-623-147-133-8 (PDF)